PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

ARTIKEL JURNAL

YUSUF A. HALID
NIM. D02416360

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
GORONTALO
2020

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Yusuf Halid[1], Muh. Firyal Akbar[2], Ramlah Alkatiri[3]
[123]Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
[3]Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Gorontalo,Indonesia
Email : yusufhalid@gmail.com

Abstract

This research aims to study the Management of State Property at Gorontalo State University. The research uses qualitative method. The result of the research showed that the management of State Property at Gorontalo State University had not achieved the expected goals and were not fully in accordance with established criteria. Some aspects that have not been in accordance with predetermined criteria are, first of all, from the legal aspects in the form of the Rector of Gorontalo State University Regulation to Manage the Management of State Property. Second, facilities, infrastructure, facilities that support activities that support the internet, do not yet support expeditious service and management and Third is the Standard Operating Procedures (SOP) are not yet available for administration and procedures for managing State Property. Fourth, Human Resources from implementing competencies are not yet competent in administering State Property itself.

Keywords: *Management; State Property; Asset*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo. Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo sudah dilaksanakan namun ketercapaian dari tujuan yang diharapkan belum seluruhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa aspek yang belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu, pertama dari aspek hukum dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo untuk mengatur Pengelolaan Barang Milik Negara. Kedua, sarana, prasarana, fasilitas penunjang kegiatan berupa konektivitas internet belum mendukung kelancaran layanan dan pengelolaan Barang Milik Negara. Ketiga, Standard Operating Procedure (SOP) belum tersedia untuk mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara. Keempat, Sumber Daya Manusia dari kompetensi pelaksana belum sepenuhnya terampil dalam penatausahaan Barang Milik Negara.

Kata kunci: Manajemen; Barang Milik Negara; Aset

PENDAHULUAN

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah, didalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan BMN/D disebutkan antara lain sumbangan/ hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan. Melalui PP Nomor 6 tahun 2006 tersebut, harapannya pengelolaan barang milik negara semakin tertib, baik dalam hal pengadministrasiannya maupun dalam hal pengelolaannya. Pemerintah juga berkewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap Barang Milik Negara, meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif dan pengamanan hukum (Afandi & Sulastri, 2012)

Dalam rangka pengamanan administratif, dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas Barang Milik Negara, juga sistem tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan maupun penghapusan. Oleh karenanya, sebagai pemenuhan dari kebutuhan tersebut, pemerintah membuat sebuah aplikasi penatausahaan Barang Milik Negara yaitu Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selain Sistem Akuntansi Keuangan.

Pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi mereka yang berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada Sub Bagian Umum/ Perlengkapan/ Rumahtangga atau semacamnya, sehingga sesuai struktur Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan Laporan Barang Milik Negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan Kementerian/Negara atau Lembaga.

Sistem Akuntansi Instansi (SAI), mempunyai dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya, sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran. SIMAK BMN memproses transaksi perolehan, perubahan dan penghapusan BMN untukmendukung SAK dalam rangka menghasilkan Laporan Neraca.Disamping itu,SIMAK-BMN menghasilkan laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN. Sebagai sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi selain Sistem Akuntansi Keuangan disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol

yang sistematis bagi mereka yang pernah atau yang memang berada dalam lingkup tugas dan tanggungjawabnya sebagai bagian dari satuan kerja pada bagian tata usaha khususnya sub bagian umum sehingga sesuai struktur unit akuntansi barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan barang milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga (Majampoh et al., 2017).

Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik Negara dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dimana BMN termasuk didalamnya adalah bentuk laporan keuangan pemerintah pusat.(Nasrudin, 2015).

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka laporan keuangan harus memenuhi kriteria yang memadai yaitu memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dinilai atau dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat kriteria tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari pemerintah (Juwita, 2013)

Karakteristik informasi yang tersedia dalam organisasi akan menjadi efektif apabila dapat mendukung pengguna informasi atau pengambil keputusan. Kesesuaian antara informasi dengan kebutuhan pembuat keputusan akan meningkatkan kualitas keputusan yang akan diambil, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi (Widodo, 2012).

Penatausahaan Barang Milik Negara dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun laporan Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat adalah dengan menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilaksanakan dengan fungsional, kapasitas hukum, transparan dan akuntabel. Pelaksana penatausahaan adalah unit yang melakukan penatausahaan barang milik Negara pada kuasa pengguna barang, dan pengelola barang (Gubali et al., 2018)

Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu perguruan tinggi ternama dan terkemuka di Provinsi Gorontaloadalah bagian dari lembaga pelayanan publik yang dalam pengelolaan Barang Milik Negara, prinsip transparansi dan akuntabilitas publik yang diusung sebagai prinsip penting yang harus dikedepankan. Hal ini menuntut Universitas Negeri Gorontalo sebagai lembaga publik mereformasi sistem dan redesigning pola-pola pengelolaan Barang Milik Negara dengan dukungan infrastruktur dan Teknologi Informasi, sebagai senjata ampuh dalam menciptakan informasi termasuk informasi akuntansi Barang Milik Negara untuk mewujudkan peningkatan akuntabilitas dan trust dari masyarakat. Universitas Negeri Gorontalo sebagai salah satu Kuasa Pengguna Barang sudah seharusnya melaksanakan kegiatan

penatausahaan Barang Milik Negara, yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Penelitian (Afandi & Sulastri, 2012) menegaskan bahwa penatausahaan Barang Milik Negara dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk dalam menyusun Laporan Barang Milik Negara yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat.

Untuk menjadi salah satu perguruan tinggi berdaya saing nasional dan bahkan berstandar international, maka Universitas Negeri Gorontalo antara lain ditunjang oleh pelayanan berbasis sistem informasi manajemen dimana pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negarasudah dilakukan di Universitas Negeri Gorontalo bahkan sejak tahun 2009. Terlebih setelah Universitas Negeri Gorontalo memperoleh pengakuan akreditasi perguruan tinggi dengan nilai A (APT Tahun 2018) berbagai terobosan telah dilakukan dalam rangkapengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo.

Harapannya keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakanSistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan barang milik negara Universitas Negeri Gorontalo. Namun demikian,upaya pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara selama ini di Universitas Negeri Gorontalo masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Melalui observasi awal yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2019 dapat diidentifikasi beberapa persoalan dalam pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo diantaranya adalah hambatan dalam waktu penyelesaian inventarisasi barang yang merupakan kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil inventarisasi barang milik Negara. Penyusunan dan pelaporan periodik secara berjenjang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kementerian Keuangan RI sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat seringkali tidak tepat waktu dengan jadwal penerimaan laporan di KPKNL.

Berdasarkan wawancara awal terhadap Kepala Bagian Umum Universitas Negeri Gorontalo yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2019, diperoleh informasi bahwa adanya berbagai persoalan dalam pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo ditentukan oleh beberapa hal. Pertama, konektivitas internet dalam jaringan sistem informasi manajemen terintegrasi di Universitas Negeri Gorontalo sewaktu-waktu terjadi gangguan, sehingga akses data dalam Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negaratidak dapat dilakukan dengan cepat ketika sewaktu-waktu dibutuhkan.Kedua, sikap pelaksana belum mendukung sepenuhnya pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo. Dalam hal ini kompetensi pelaksana belum sepenuhnya terampil dalam penatausahaan barang milik negara di Universitas Negeri Gorontalo. Ketiga, mekanisme dan prosedur (SOP) pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara belum ada di semua unit kerja dan fakultas, sehingga belum ada kesamaan bertindak dalam pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Keempat, pengawasan internal terhadap proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara masih lemah. Kelima, monitoring dan evaluasi sebagai bahan tindak lanjut dalam pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo belum secara rutin dilakukan, hal inilah yang menjadi pertimbangan sehingga penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana fakta empirik dan *scientific* yang sebenarnya terjadi dalam pengelolaan Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo.

Beberapa penelitian terdahulu sepert yang dilakukan oleh Afandi dan Sulastri, (2012) mengenai Peranan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Dalam Menunjang Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Bandung), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Negara Properti sangat penting dalam pengelolaan Pusat Penelitian Geoteknologi BMN, meskipun dalam hal manajemen Pusat Penelitian Geoteknologi Properti Negara dinilai secara kualitatif tidak berjalan dengan baik, terutama di Indonesia kasus inventaris milik negara.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Atmaja & Susanto, 2019) dengan judul Optimasi Aplikasi SIMAK-BMN untuk Inventarisasi Barang Milik Negara Berbasis Aplikasi Mobile Android. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Aplikasi SIMAK-BMN yang bersifat stand alonetelah berhasil dilakukan optimasi, yakni dengan mengembangkannya menjadi sistem monitoring BMN terpadu yang terdiri dari sistem berbasis web. Tentunya dua penelitian terdahulu tersebut berbeda dengan secara fokus dimana dalam penelitian ini secara umum akan melihat pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2009. Selain itu dari sisi metode dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif karena tujuannya mengungkapkan dan menggambarkan

fakta-fakta mengenai pengelolaan barang milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo.

Adapun sumber data dalam penelitian ini dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber informan/*key informan* yang mana dalam penelitian ini ialah sebanyak 13 orang, antara lain : Kepala Bagian Umum Universitas Negeri Gorontalo; Kepala Sub Bagian Barang Milik Negara Universitas Negeri Gorontalo; Operator SIMAK-BMN Universitas Negeri Gorontalo; serta 10 orang Kepala sub bagian umum dan barang milik negara di 10 fakultas Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya untuk data sekunder diperoleh dari penelusuran referensi, baik itu artikel jurnal, buku terkait riset yang dilakukan baik secara *online* dan manual.

Adapun Teknik pengumpulan data yang dilaksanakan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dengan beberapa tahapan yakni Reduksi data *(Data Reduction*), Menampilkan Data (*Data Display*) dan Verifikasi data (*Data Verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini berfokus padaproses pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo. Oleh karena itu, untuk mengukur proses pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, akan dilihat dari beberapa indikator sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 21, terdiri dari: (1) dasar hukum pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradalam organisasi, (2) ketersediaan Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, (3) jangka waktu penyelesaian penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, (4) produk dari pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, (5) sarana,prasarana dan/atau fasilitaspenunjang pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, (6) jumlah dan kompetensi pelaksanapengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, (7) pengawasan internal terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, (8) penanganan pengaduanpengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, (9) saran dan masukan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, (10) evaluasi kinerja pelaksananpengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, masing-masing penjhelasan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. ***Dasar hukum***

Dasar hukum adalah adalah kebijakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo yang dalam penelitian ini adalah Peraturan Rektor sebagai produk hukum yang memiliki dan mempertimbangkan hukum, juga harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Peraturan Rektor adalah ketentuan bersifat mengatur yang ditetapkan oleh rektor.Dengan adanya Peraturan Rektor, maka akan memberikan jaminan hukum atas dasar perizinan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontaloyang tidak dapat dihilangkan dari prinsip persetujuan, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi yang berarti proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalodisetujui dan harus dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademik.

Belum adanya Peraturan Rektor yang menjadi dasar hukum dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo, maka proses ini tidak memiliki legalitas dalam pelaksanaannya. Sehingga urgensi Peraturan Rektor sebagai dasar hukum dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo menjadi sangat penting.

2. ***Standard Operating Procedure (SOP)***

SOP berkaitan dengan sistem dan prosedur pada pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo yang mengatur alur, persyaratan kelengkapan data barang milik negara, biaya dan waktu penyelesaian pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Belum tersedianya SOP untuk mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaanpengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo, maka menurut peneliti hal ini akan menghambat dalam proses pengelolaan itu sendiri. Dalam konteks pelayanan publik, hasil yang dicapai dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaratidak akan sesuai dengan keinginan atau pencapaian hasil tidak sesuai harapan secara efektif dan efisien. Apalagi penelitian (Badjuka, 2019) menegaskan bahwa prosedur sebagai pedoman yang memberi acuan

bagi pola kerja yang terarah menjadi acuan yang mengatur dan mengarahkan tata kerja alur pelayanan, sehingga diharapkan pelayanan dalam organisasi menjadi lebih efektif dan efisien.

Belum tersedianya SOP yang mengatur proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo berdampak pada banyak aspek. Dalam penelitian ini berdampak pada belum jelasnya jangka waktu penyelesaian item pekerjaan, belum jelasnya produk yang harus dihasilkan, belum optimalnya pelaksanaan pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta evaluasi kinerja dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Oleh karena itu, peneliti menegaskan perlunya mengatur proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang distandarisir melalui kebijakan dan prosedur tertulis. Standar baku tersebut termasuk mengatur mekanisme pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta evaluasi kinerja dalam proses optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo.

3. ***Jangka waktu penyelesaian penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara***

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik secara jelas menyebutkan bahwa salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam melakukan pelayanan adalah menentukan standar pelayanan dimana salah satu itemnya adalah kejelasan mengenai jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Memperhatikan kondisi real di Universitas Negeri Gorontalo yang menunjukkan belun jelasnya jangka waktu penyelesaian penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, peneliti menegaskan bahwa aspek yang tidak dapat ditunda dalam pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo adalah menetapkan standar jangka waktu penyelesaian yang dibutuhkan untuk penatausahaan pengelolaan Barang Milik Negara. Standar jangka waktu penyelesaian yang dimaksudkan paling tidak mengatur jangka penginputan dari unit kerja sampai kepada operator universitas maupun jangka waktu yang dibutuhkan untuk pelaporan dari universitas ke kementerian.

Terkait dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan, peneliti mempertegas bahwa seluruh unsur yang terlibat dalam pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara khususnya operator fakultas dan universitas berkewajiban mematuhi dan memenuhi standar jangka waktu penyelesaian pekerjaan dengan tetap menyelaraskan dengan kemampuan dan kondisi lingkungan

perguruan tinggi. Hal ini penting dilakukan untuk menjamin kelancaran pekerjaan dan pelayanan yang diberikan dalam pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.

4. ***Produk dari pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara***

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik secara jelas menyebutkan bahwa salah satu kewajiban instansi pemerintah dalam melakukan pelayanan adalah menentukan standar pelayanan dimana salah satu itemnya adalah produk. Oleh karenanya, peneliti memandang penting keberadaan produk dari pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo.

Memperhatikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa produk isian dalam software Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negarasudah terinput dengan baik, namun jenis produk data yang dihasilkan oleh setiap unit kerja belum jelas, maka dalam hal ini untuk menjamin ketersediaan dan kejelasan produk data dari unit kerja, peneliti menegaskan perlu adanya jalinan kerjasama diantara pelaksana.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo, dapat dilakukan kerja sama antar pelaksana meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional atau pendukung pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo. Dalam hal pelaksana di unit kerja yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya, maka dapat meminta bantuan kepada pelaksana pada unit kerja lain yang mempunyai kapasitas memadai.

5. ***Sarana,prasarana dan/atau fasilitaspenunjang pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.***

Sarana prasarana fasilitas penunjang kegiatan berkaitan dengan penggunaan sarana prasarana fasilitas penunjang untuk mempermudah proses optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Peneliti berpandangan bahwa kendala utama proses optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo berkaitan dengan penggunaan sistem informasi yang terbatas pada penggunaan aplikasi software SIMAK-BMN. SIMAK-BMN belum berfungsi secara terintegrasi antar fakultas dan universitas yang memungkinkan data pada fakultas dapat diakses oleh fakultas lainnya dan universitas. Jika hal ini dibiarkan, maka akan menghambat proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo.

Bahasan di atas jika diselaraskan dengan konsep pengelolaan yaitu tercapainya efisiensi dan efiktifitas, maka Universitas Negeri Gorontalo dituntut untuk meningkatkan kinerja dan daya saing agar dapat menjadi organisasi yang responsif, inovatif, efektif, efisien dan menguntungkan. Oleh karena itu, peneliti menilai penting dan mutlak jika Universitas Negeri Gorontalo perlu mengembangkan teknologi terintegrasi sebagai sarana pendukung untuk mempermudah proses proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Adanya kebutuhan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang lebih cepat yaitu kebutuhan adaptasi teknologi pelayanan administrasi. Melalui interkonektivitas dari peralatan yang digunakan operator dan pelaksana teknis dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya akan lebih memudahkan dan mendekatkan mereka secara efektif dan efisien. Hal ini karena kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan akan mempengaruhi prosedur, kecepatan proses dan kualitas keluaran yang akan dihasilkan.

6. ***Jumlah dan kompetensi pelaksana pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.***

Ketersediaan sumber daya manusia berkualitas menjadi mendorong kemajuanorganisasidalam melakukan fungsi pelayanan publik lebih optimal, sedangkan peningkatan kualifikasi tingkat pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Peneliti meyakini bahwa sumber daya manusia merupakan elemen Universitas Negeri Gorontaloyang sangat penting, menjadi salah satu pilar utama sekaligus penggerak roda Universitas Negeri Gorontalodalam upaya mewujudkan proses optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Oleh karena itu, agar mampu memberi kontribusi secara optimal untuk merealisasikan misi organisasi dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara yang optimal harus dipastikan operator SIMAK-BMN dan sumber daya pelaksana lainnya dikelola sebaik mungkin melalui perencanaan dan rekrutmen sesuai kebutuhan, memberikan pendidikan dan pelatihan yang berhubungan erat dengan pekerjaan yang dilakukan.

Kemajuan dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara sangat bergantung pada efektifitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya. Kemampuan para operator dan pelaksana sangat berperan penting dan menentukan keberhasilannya. Suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya akan selalu berhadapan dengan manusia

sebagai sumber daya yang dinamis dan memiliki kemampuan untuk terus berkembang. Berkembanganya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja akan mempengaruhi stabilitas dan organisasi.

7. ***Pengawasan internal terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara***

Pengawasan internal terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu untuk memastikan arahan-arahan dari pihak manajemen dipatuhi dan dilaksanakan. Penelitian (Rusvianto et al., 2018) menekankan bahwa sekurang-kurangnya pengendalian/ pengawasan memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) kegiatan pengawasan diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah, (2) kegiatan pengawasan harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko, (3) kegiatan pengawasan yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah, (4) kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis, (5) prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis, dan, (6) kegiatan pengawasan dievaluasi secara teratur untuk memastikan fokus kegiatan itu masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

Memperhatikan pandangan di atas dan mengingat pengawasan internal terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo selama ini belum dilakukan secara sungguh-sungguh, peneliti menegaskan bahwa sudah saatnya pengawasan internal terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo dilakukan secara konsisten sebagai usaha berkelanjutan untuk meyakinkan bahwa setiap gerak organisasi Universitas Negeri Gorontalo secara sinergis sedang mengarah kepada usaha pencapaian tujuan. Ini bisa dilakukan oleh manajemen Universitas Negeri Gorontalo sendiri atau dengan bantuan satuan pengawas internalnya.Dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

8. ***Penanganan pengaduan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.***

Penanganan pengaduan merupakan proses penanganan pengaduan mulai dari tahap penyeleksian, penelaahan,dan pengklasifikasian sampai dengan kepastian penyelesaian pengaduan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Memperhatikan Laporan Kajian Manajemen Pengaduan Masyarakat dalam Pelayanan Publik, peneliti menegaskan bahwa pelayanan pengaduan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo seharusnya diupayakan agar

mempermudah civitas akademik yang akan menyampaikan pengaduannya, antara lain dengan menyediakan layanan hotline, sms, faksimili dan situs web sebagai sarana mempermudah pengaduan civitas akademik. Untuk itu manajemen Universitas Negeri Gorontalo perlu menjamin kelengkapan elemen manajemen komplain yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan yaitu: organisasi, fasilitasi reward dan punishment bagi petugas pelayanan, saluran pengaduan dan infrastruktur, manajemen data serta pendanaan operasional. Penanganan pengaduan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah sistem, mekanisme, dan prosedur mengelola keluhan-keluhan atau protes-protes yang mungkin muncul dari berbagai pihak di Universitas Negeri Gorontalo, sehingga tidak menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran pekerjaan maupun kinerja Universitas Negeri Gorontalo.

Peneliti berkeyakinan bahwa pertimbangan yang digunakan untuk memperbaiki menajemen pengaduan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo adalah masih lemahnya kondisi aktual elemen manajemen komplain yang dimiliki oleh Universitas Negeri Gorontalo. Hal-hal yang dianggap lemah adalahUniversitas Negeri Gorontalobelum memiliki SOP penanganan complain, tim atau bagian penanganan komplain belum tercantum dalam struktur organisasi, koordinasi dan sinergi belum kuat SDM menangani kegiatan penanganan pengaduan juga menangani kegiatan lain, sebagaian besar sarana dan infrastruktur yang dimiliki masih terbatas pada kotak saran dan hotline, pencatatan data pengaduan yang masuk sudah dilakukan tapi pelaporan penanganan keluhan masih belum dicatat; pendanaan operasional masih terbatas; dan kesadaran sivitas akademik akan hak mengadu masih kurang. Secara umum sivitas akademik belum memahami bahwa keberadaan pelayanan pengaduan atas layanan, diindikasikan dengan adanya kotak saran.

9. ***Saran dan masukan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara***

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka peneliti memandang tepat jika mekanisme saran dan masukan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo sudah seharusnya diterapkan dimana sivitas akademik khususnya pelaksana yang terlibat dalam proses ini memberitahukan kepada pimpinan unit kerja/ fakultas/ universitas untuk memperbaiki proses pengelolaan Barang Milik Negaramenggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaraapabila dalam proses tersebut tidak sesuai dengan harapan. Unsur pimpinan juga dapat memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara apabila tidak sesuai dengan harapan.

Menurut peneliti, mekanisme penyampaian saran dan masukanterhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dapat dilakukan secara langsung melalui pertemuan dan rapat, handphone dan tidak langsung melalui surat pemberitahuan. Melalui berbagai teknik penyampaian ini peneliti meyakini bahwa saran dan masukan terhadap pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo dapat dijalankan secara efektif.

10. ***Evaluasi kinerja pelaksanan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara***

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik secara jelas disebutkan pada bagian ketiga pasal 10 bahwa evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peneliti menekankan pentingnya evaluasi kinerja pelaksanan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo dilakukan secara berkesinambungan. Pentingnya evaluasi kinerja tersebut antara lain dimaksudkan untuk memastikan terlaksananya pekerjaan sesuai program yang direncanakan sebelumnya. Disamping itu untuk melihat berbagai kendala dan hambatan yang memengaruhi proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Berdasarkan evaluasi inilah akan dilakukan tindak lanjut perbaikan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Peneliti menegaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksananpengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, maka pihak manajemen Universitas Negeri Gorontalo khususnya Bagian Kepegawaian berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana yang terlibat dalam pelaksananpengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara tersebut. Evaluasi terhadap kinerja pelaksana menjadi sangat penting dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat dikemukakan bahwa proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo sudah dilaksanakan, namun ketercapaian dari tujuan yang diharapkan dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaratersebut belum seluruhnya sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan. Beberapa aspek yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu (1) sarana, prasarana, fasilitas penunjang kegiatan dengan adanya sistem online untuk pencatatan barang milik negara di Universitas Negeri Gorontalomelalui SIMAK-BMN.Selain itu, Universitas Negeri Gorontalo mengembangkan sendiri pencatatan barang milik Negara secara online melalui situs.ung.ac.id pada menu manajemen aset; (2) sumber daya manusia dari jumlah operator SIMAK-BMN sudah memadai sesuai kebutuhan volume pekerjaan dalam pengelolaan barang milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo. Beberapa aspek yang belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu (1) dasar hukum dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo belum ditetapkan untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dalam organisasi; (2) sarana, prasarana, fasilitas penunjang kegiatan berupa konektivitas internet belum mendukung kelancaran layanan dan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara; (3) Standard Operating Procedure (SOP) belum tersedia untuk mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara; (4) sumber daya manusia dari kompetensi pelaksana belum sepenuhnya terampil dalam penatausahaan barang milik Negara.

PENUTUP

Simpulan

Proses pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di Universitas Negeri Gorontalo sudah dilaksanakan, namun ketercapaian dari tujuan yang diharapkan dalampengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara tersebut belum seluruhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Aspek yang sudah sesuai dengan kriteria yaitu pertama dari aspek sarana, prasarana, fasilitas penunjang kegiatan sudah berdasarkan sistem online yang didukung oleh websitesitu.ung.ac.idpadamenumanajemenaset.Kedua, dari aspek sumber daya manusia dilihat dari jumlah operatorSistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara sudah memadai sesuai kebutuhan volume pekerjaandalam pengelolaan Barang Milik Negaradi Universitas Negeri Gorontalo. Beberapa aspek yang belum sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, pertama, dari aspek dasar hukum dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo belum ditetapkan untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dalam organisasi. Kedua, sarana, prasarana, fasilitas penunjang kegiatan berupa konektivitas internet belum mendukung kelancaran layanan dan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara.Ketiga, Standard Operating Procedure (SOP) belum tersedia untuk mengatur

mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Keempat, sumber daya manusia dari kompetensi pelaksana belum sepenuhnya terampil dalam penatausahaan Barang Milik Negara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disarankan kepada manajemen Universitas Negeri Gorontalo diharapkan dapat melakukan maintenance secara periodik terhadap pencatatan barang milik Negara guna menjamin kelancaran dukungan data dan pencatatan asset dan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Kepada Pimpinan Universitas Negeri Gorontalo diharapkan dapat menetapkan Peraturan Rektor sebagai dasar hukum untuk mengatur pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negaradalam organisasi. Sedangkan kepada pihak PUSTIKOM Universitas Negeri Gorontalo diharapkan dapat menambah kemampuan dan daya konektivitas internet guna mendukung kelancaran layanan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Sementara itu, pimpinan Universitas Negeri Gorontalo diharapkan dapat menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara, sehingga ikut menjamin terlaksananya pengawasan internal, penyelesaian saran dan aduan, serta monitoring dan evaluasi yang optimal. Lebih lanjut, Bagian Kepegawaian diharapkan dapat melaksanakan pelatihan teknis bagi operator/ pelaksana pengelolaan Barang Milik Negara menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara di tingkat fakultas untuk meningkatkan keterampilan dalam penatausahaan barang milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, M., & Sulastri, N. A. (2012). Peranan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Dalam Menunjang Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus di Pusat Penelitian Geoteknologi LIPI Bandung). *Jurnal Ilmu Administrasi*, *IX*, 290–308.

Atmaja, A. P., & Susanto, F. (2019). Optimasi Aplikasi SIMAK-BMN untuk Inventarisasi Barang Milik Negara Berbasis Aplikasi Mobile Android. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, *6*(2), 201–210.

Badjuka, A. H. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SIRBA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PADA BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (BLU UNG). *Thesis*, *1*(711517004).

Gubali, M., Tinangon, J., & Pusung, R. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi Simak-Bmn Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *13*(04), 216–224. https://doi.org/10.32400/gc.13.03.20104.2018

Juwita, R. (2013). Pengaruh implementasi

standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. *Trikonomika*, *12*(2), 201–214.

Majampoh, G., Saerang, D. P. E., & Suwetja, I. G. (2017). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak Bmn) Pada Kantor Imigrasi Kelas Ii Tahuna. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, *12*(2), 681–693. https://doi.org/10.32400/gc.12.2.18018.2017

Nasrudin, E. (2015). Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-Bmn) Terhadap Pengelolaan Aset Negara. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, *13*(2), 45. https://doi.org/10.19184/jauj.v13i2.1878

Rusvianto, D., Mulyani, S., & Yuliafitri, I. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Skpd Kota Bandung). *Banque Syar'i: Jurnal Llmiah Perbankan Syariah*, *4*(1), 33–67.

Widodo, H. (2012). Penggunaan Informasi Sistem Akuntansi Manajemen Dalam Intensitas Persaingan Pasar untuk Peningkatan Kinerja Perusahaan. *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, *1*(3), 53–57.